



Implementasi Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level 1 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Salsabila Ambadena^{1*}, Dwiki Adi Putra², Isabella³

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri Palembang, Indonesia

Email: salshabilaambadena@gmail.com¹, dwiki@uigm.ac.id², isabella@uigm.ac.id³

*Penulis Korespondensi: salshabilaambadena@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of Level 1 Procurement of Goods and Services (PBJ) Training and Competency Testing at the Regional Human Resources Development Agency (BPSDMD) of South Sumatra Province in 2025. The study used a qualitative approach with descriptive methods through interviews, observation, documentation, and questionnaires. The results indicate that the implementation of Level 1 PBJ training and competency testing has been running well in accordance with the provisions of the Government Goods/Services Procurement Policy Agency (LKPP). The success of the program is supported by effective communication, adequate resource availability, high commitment and responsibility of implementers, and a clear and coordinated bureaucratic structure. Despite several administrative obstacles and budget limitations, program implementation remains effective through ongoing monitoring and evaluation mechanisms. Overall, this program has been able to support the improvement of the competency of State Civil Apparatus (ASN) in the procurement of goods and services and strengthen professionalism in carrying out government duties.*

Keywords: ASN, BPSDMD of South Sumatra Province, Policy Implementation, Procurement of Goods and Services, Training and Competency Testing.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Level 1 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelatihan dan uji kompetensi PBJ Level 1 telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Keberhasilan pelaksanaan program didukung oleh komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya yang memadai, komitmen dan tanggung jawab pelaksana yang tinggi, serta struktur birokrasi yang jelas dan terkoordinasi. Meskipun masih terdapat beberapa kendala administratif dan keterbatasan anggaran, pelaksanaan program tetap berlangsung efektif melalui mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, program ini mampu mendukung peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang pengadaan barang dan jasa serta memperkuat profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Kata kunci: ASN, BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan, Implementasi Kebijakan, Pelatihan dan Uji Kompetensi, Pengadaan Barang dan Jasa.

1. LATAR BELAKANG

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkontribusi terhadap efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik, dan keberhasilan pembangunan nasional. Pengadaan yang efektif, transparan, akuntabel, dan kompetitif tidak hanya mendukung pengelolaan keuangan negara, tetapi juga mencerminkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (Satrio & Lestari, 2024). Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam PBJ menjadi faktor penting dalam menjamin kualitas dan efektivitas proses pengadaan (Dharmayanti & Rakhmasari, 2024).

Pelaksanaan PBJ di Indonesia didukung oleh regulasi, termasuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Regulasi tersebut menekankan pentingnya kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan. Namun, pada praktiknya masih terdapat ASN yang menghadapi kendala dalam memahami regulasi, prosedur pemilihan penyedia, penyusunan spesifikasi teknis, serta penggunaan sistem pengadaan elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pelatihan dan uji kompetensi sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dan kemampuan ASN dalam bidang PBJ (Patria, 2021; Nainggolan et al., 2022).

Di Provinsi Sumatera Selatan, kebutuhan terhadap ASN yang kompeten dalam PBJ semakin meningkat seiring dengan besarnya kegiatan pengadaan untuk mendukung pembangunan daerah. BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan Pelatihan dan Uji Kompetensi PBJ Level 1 sebagai upaya meningkatkan kompetensi aparatur sesuai standar yang ditetapkan LKPP. Pada tahun 2025, kegiatan tersebut diikuti oleh peserta dari berbagai instansi/OPD, termasuk Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, serta Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan, dengan total 38 peserta berdasarkan data peserta pelatihan.

Meskipun pelatihan telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai tantangan, seperti kesiapan peserta yang beragam, pemahaman terhadap perubahan regulasi yang belum merata, keterbatasan sarana pelatihan, serta belum optimalnya tindak lanjut terhadap ASN yang telah memperoleh sertifikasi. Penelitian Satrio dan Lestari (2024) menunjukkan bahwa pelatihan PBJ dapat meningkatkan pemahaman dan perilaku kerja peserta, tetapi penelitian tersebut masih terbatas pada lingkup instansi tertentu dan belum mengkaji pelaksanaan pelatihan PBJ Level 1 dalam konteks pemerintahan daerah yang lebih kompleks.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pelatihan dan Uji Kompetensi PBJ Level 1 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan untuk mengetahui bagaimana program tersebut dilaksanakan serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pencapaian kompetensi peserta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan pelatihan serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pengembangan kompetensi ASN di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980) sebagai landasan untuk menganalisis pelaksanaan Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Level 1. Menurut Edwards III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Komunikasi berkaitan dengan kejelasan dan konsistensi penyampaian informasi, arahan, serta prosedur kepada pihak yang terlibat. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, dana, sarana prasarana, dan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan program. Disposisi berkaitan dengan pemahaman, komitmen, motivasi, dan tanggung jawab pelaksana, sedangkan struktur birokrasi mencakup SOP, koordinasi antarinstansi, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi (Edwards III, 1980). Selain teori implementasi, penelitian ini menggunakan konsep pelatihan dan kompetensi. Menurut Rivai (2011), pelatihan merupakan proses terstruktur yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai dalam melaksanakan tugas. Sementara itu, kompetensi PBJ Level 1 dalam penelitian ini dipahami sebagai kemampuan dasar ASN atau staf pengadaan dalam menguasai prinsip, prosedur, dan norma pengadaan barang dan jasa pemerintah (Rivai, 2011).

Berdasarkan teori tersebut, implementasi Pelatihan dan Uji Kompetensi PBJ Level 1 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan dianalisis melalui empat aspek Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi pelaksanaan program serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pencapaian tujuan pelatihan dan uji kompetensi PBJ Level 1.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Level 1 di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya yang diselenggarakan oleh BPSDMD bekerja sama dengan LKPP. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena berdasarkan perspektif pihak-pihak yang terlibat secara langsung (Creswell, 2014; Sugiyono, 2022).

Unit analisis penelitian meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pelatihan serta uji kompetensi PBJ Level 1. Informan dipilih menggunakan teknik

purposive sampling, yang terdiri atas Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDMD, tim penyelenggara pelatihan, asesor/penguji kompetensi, perwakilan LKPP, dan 34 peserta pelatihan. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen LKPP, laporan kegiatan BPSDMD, regulasi terkait PBJ, serta penelitian terdahulu.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Observasi dilakukan untuk mengamati proses pelatihan, keterlibatan peserta, pelaksanaan uji kompetensi, serta fasilitas pendukung. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada informan yang dipilih secara purposive. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari laporan, arsip, panduan pelatihan, daftar kehadiran, foto kegiatan, dan regulasi. Sementara itu, kuesioner menggunakan skala Likert dan disebarkan secara daring melalui Google Form.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang terdiri atas tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang diperoleh diseleksi dan difokuskan pada pelaksanaan pelatihan, mekanisme uji kompetensi, serta faktor pendukung dan penghambat, kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel, dan kutipan wawancara untuk menghasilkan kesimpulan yang terverifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi (*communication*)

A. Transmisi informasi Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level 1 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

Pada aspek komunikasi, peneliti membahas bagaimana penyampaian informasi yang diterapkan oleh BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan kepada para peserta selama penyelenggaraan Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level 1 Tahun 2025. Komunikasi merupakan elemen penting dalam pelaksanaan program karena fungsinya dalam menyampaikan tujuan, mekanisme, dan pelaksanaan kegiatan kepada peserta pelatihan. Dengan komunikasi yang efektif, informasi mengenai program dapat diterima dan dimengerti dengan baik, sehingga mendukung kesuksesan dalam pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi.

Berdasarkan wawancara dan hasil kuesioner, pelaksanaan komunikasi dalam program Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level 1 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 telah berjalan dengan baik. Informasi disampaikan melalui koordinasi yang terorganisir antara BPSDMD, panitia, fasilitator, dan LKPP, dari tahap

pendaftaran peserta hingga saat pelatihan dan ujian kompetensi. Fasilitator juga menerapkan cara komunikasi yang sesuai dengan karakteristik peserta dewasa sehingga materi dapat diterima dengan baik. Selain itu, penjelasan tugas yang jelas antara panitia dan LKPP dalam penyampaian informasi serta penggunaan media komunikasi yang efisien membantu peserta mendapatkan informasi dengan jelas. Hal ini diperkuat oleh umpan balik peserta yang mengatakan bahwa informasi disampaikan dengan baik sehingga mereka dapat mengikuti kegiatan tanpa hambatan. Dengan demikian, komunikasi yang efektif telah memberikan dukungan terhadap keberhasilan program pelatihan dan uji kompetensi.

B. Kejelasan informasi Pelatihan Barang dan Jasa Level 1 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan

Kejelasan informasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam indikator komunikasi. Hal ini berhubungan dengan cara penyampaian informasi oleh penyelenggara yang harus dapat dipahami dengan baik oleh peserta, agar tidak terjadi kesalahpahaman selama kegiatan berlangsung. Dengan informasi yang jelas, peserta akan lebih mudah memahami tujuan, langkah-langkah, serta teknik pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi.

Berdasarkan hasil dari wawancara dan kuesioner, ketepatan informasi selama Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level 1 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 menunjukkan hasil yang positif. Informasi disebarkan melalui berbagai saluran, termasuk WhatsApp, telepon, poster, media sosial, surat resmi, serta alat pembelajaran seperti PowerPoint dan Quizizz. Penggunaan berbagai platform komunikasi ini membantu penyelenggara dalam menyampaikan informasi dan memudahkan peserta untuk memahami jadwal, proses, serta pelaksanaan acara. Hal ini diperkuat oleh feedback dari peserta yang menyatakan bahwa informasi yang diberikan cukup jelas dan mudah dimengerti, sehingga pelatihan dan uji kompetensi dapat diikuti dengan baik.

C. Konsistensi informasi Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level 1

Konsistensi dalam penyampaian informasi merupakan elemen krusial dalam ukuran komunikasi yang berhubungan dengan keselarasan dan kesinambungan informasi yang diberikan kepada peserta selama program berjalan. Informasi yang terjaga konsistensinya akan memudahkan peserta dalam memahami proses kegiatan dengan baik dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dalam menerima informasi.

Berdasarkan hasil kuisisioner yang telah dilakukan oleh peneliti, mayoritas peserta mengungkapkan bahwa informasi yang disampaikan oleh penyelenggara relatif konsisten. Peserta tidak mengalami banyak perubahan pada informasi yang diterima, sehingga mereka

dapat mengikuti pelaksanaan kegiatan dengan lancar.

Berdasarkan wawancara dan kuesioner yang dilakukan, penyampaian informasi dalam Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level 1 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 tergolong baik. Informasi tentang jadwal dan langkah-langkah kegiatan disampaikan dengan jelas dan tepat waktu, yang memungkinkan peserta untuk mengikuti acara dengan baik. Namun, masih ada beberapa masalah komunikasi, seperti keterlambatan dalam memberikan informasi, kurangnya koordinasi menjelang ujian, serta perbedaan informasi mengenai kesiapan fasilitas. Secara keseluruhan, konsistensi informasi telah membantu kelancaran pelaksanaan program, namun perlu ada perbaikan dalam hal koordinasi dan distribusi informasi.

Sumber Daya (*Resources*)

A. Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level 1

Kualitas sumber daya merupakan salah satu elemen krusial yang mendukung keberhasilan pelaksanaan sebuah program. Dalam penyelenggaraan Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat 1 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, kualitas tenaga kerja terkait dengan kompetensi pengajar, anggota panitia, serta para peserta dalam melaksanakan dan mengikuti sesi pelatihan. Sumber daya manusia yang memiliki kualitas baik akan berkontribusi terhadap efisiensi pelaksanaan program dan pencapaian target kegiatan.

Berdasarkan hasil dari wawancara dan kuisisioner, mutu sumber daya manusia dalam pelatihan dan pengujian kompetensi pengadaan barang dan jasa Level 1 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 dinilai memuaskan. Tim panitia, fasilitator, dan penguji memiliki kualifikasi yang cukup dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga kegiatan berlangsung lancar. Meskipun demikian, sejumlah peserta masih menghadapi masalah dalam memahami materi yang bersifat teknis, keterbatasan waktu belajar, dan perasaan gugup saat menghadapi uji kompetensi. Secara keseluruhan, kualitas sumber daya manusia sudah mendukung keberhasilan program, namun masih diperlukan perbaikan dalam penguasaan materi dan pengaturan waktu pelatihan.

B. Sarana dan prasarana Pelatihan dan Uji Kompetensi Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level 1

Sarana dan prasarana merupakan salah satu elemen penting yang mendukung keberhasilan suatu program. Ketersediaan fasilitas yang cukup dapat memperlancar proses kegiatan sehingga tujuan program bisa dicapai dengan baik. Dalam penyelenggaraan Pelatihan

dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat 1 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, fasilitas dan infrastruktur memiliki peran krusial dalam mendukung proses belajar dan pelaksanaan ujian kompetensi.

Berdasarkan hasil dari wawancara dan kuesioner, infrastruktur untuk Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level 1 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sudah cukup baik dan mendukung terhadap pelaksanaan kegiatan. Sarana seperti laboratorium komputer, ruang CAT, ruang kuliah, akses internet, asrama, serta peralatan pelatihan telah disediakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Ini didukung oleh penilaian dari panitia, fasilitator, penguji, dan peserta yang menilai bahwa fasilitas yang ada nyaman, lengkap, dan mampu mendukung kelancaran proses pelatihan serta uji kompetensi.

Disposisi (*Disposition*)

A. Pemahaman terhadap Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level 1

Pemahaman mengenai pelatihan merupakan elemen penting dalam indikator disposisi. Se jauh mana peserta memahami materi pelatihan akan berpengaruh terhadap keberhasilan program, karena peserta yang menguasai materi akan lebih mudah menerapkan pengetahuan yang didapat saat menjalankan tugas di area pengadaan barang dan jasa. Di samping itu, sejauh mana pemahaman peserta juga dapat dijadikan tolak ukur efektivitas pelaksanaan pelatihan oleh penyelenggara.

Dalam pelaksanaan Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level 1 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, perhatian khusus diberikan kepada sejauh mana peserta memahami materi yang disampaikan oleh penyelenggara. Topik yang diajarkan mencakup konsep dasar pengadaan barang dan jasa, peraturan terkait pengadaan, langkah-langkah dalam proses pengadaan, serta metode pelaksanaan uji kemampuan.

Berdasarkan hasil dari wawancara dan kuisisioner, tingkat pemahaman mengenai pelatihan dalam Program Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level 1 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 tergolong memuaskan. Hal ini didukung oleh penyelenggara yang mengerti tujuan pelatihan, pengajar dan penguji yang berkualitas serta memiliki sertifikat, serta materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Para peserta juga merasakan bahwa materi pelatihan sangat membantu mereka dalam memahami peraturan dan prosedur pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, pemahaman yang baik dari semua pihak telah berkontribusi pada efektivitas dan keberhasilan penyelenggaraan program pelatihan.

B. Komitmen dan Motivasi Dalam Pelaksanaan Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level 1

Komitmen dan motivasi merupakan elemen kunci dalam indikator disposisi karena berhubungan dengan ketekunan dan niat seseorang untuk melaksanakan dan berpartisipasi dalam suatu program. Dalam penyelenggaraan Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level 1 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025, komitmen dan semangat menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan peserta dalam memahami materi pelatihan serta mengikuti uji kompetensi. Semakin tinggi tingkat komitmen dan semangat yang dimiliki, semakin besar pula usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan pelatihan yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil dari wawancara dan kuesioner, komitmen serta semangat semua pihak yang terlibat dalam Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level 1 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat dikategorikan baik. Penyelenggara, panitia, fasilitator, dan penguji menjalankan peran mereka sesuai dengan prosedur, mengedepankan profesionalisme, kode etik, dan objektivitas dalam proses kegiatan. Komitmen ini didukung oleh ulasan positif dari peserta yang menyatakan bahwa materi pelatihan relevan dengan kebutuhan pekerjaan, disampaikan dengan baik, serta dilaksanakan secara interaktif. Oleh karena itu, komitmen dan motivasi yang kuat telah berkontribusi terhadap efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan pelatihan serta uji kompetensi.

C. Tanggungjawab dan Integritas Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level 1 :

Tanggung jawab serta integritas merupakan elemen penting dalam indikator disposisi karena berhubungan dengan sikap dan tindakan individu saat menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Dalam rangka Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level 1 yang diselenggarakan di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025, tanggung jawab dan integritas menjadi unsur yang membantu menjamin pelaksanaan kegiatan yang teratur, profesional, dan sejalan dengan tujuan yang telah ditentukan. Kehadiran tanggung jawab dan integritas dari penyelenggara, instruktur, serta peserta dapat berpengaruh besar terhadap kualitas pelaksanaan pelatihan dan hasil yang diperoleh oleh peserta.

Berdasarkan wawancara dan kuesioner yang telah dilakukan, tanggung jawab serta integritas dalam pelaksanaan Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level 1 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 telah diterapkan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat. Panitia menunjukkan tingkat tanggung jawab yang tinggi melalui komitmen dalam mendampingi peserta sepanjang acara dan respons yang cepat dalam

menyelesaikan berbagai kendala teknis yang muncul. Fasilitator pun melaksanakan perannya secara profesional dengan berusaha meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui metode yang interaktif dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Di sisi lain, pengawas ujian menjaga integritas pelaksanaan uji kompetensi dengan memastikan peserta mengikuti aturan dan mengikuti ujian secara mandiri. Hal ini didukung oleh penilaian peserta yang mengungkapkan bahwa pelatihan berlangsung dengan baik, materi disampaikan secara jelas, dan suasana pembelajaran sangat mendukung. Dengan demikian, tanggung jawab dan integritas yang dimiliki oleh penyelenggara, fasilitator, dan pengawas telah berkontribusi pada kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi.

Struktur Organisasi

Struktur birokrasi merupakan elemen krusial dalam pelaksanaan kebijakan berdasarkan pandangan George C. Edward III. Ini terkait dengan cara pembagian tanggung jawab, otoritas, langkah kerja, serta kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam realisasi suatu program. Dengan adanya struktur birokrasi yang terdefinisi dengan baik, pelaksanaan kegiatan akan menjadi lebih lancar karena setiap individu mengetahui peran dan tanggung jawab mereka. Di sisi lain, struktur birokrasi yang tidak jelas bisa mengganggu pelaksanaan program dan menyebabkan ketidakefisienan dalam proses kegiatan.

Dalam penelitian ini, indikator dari struktur birokrasi diterapkan untuk menganalisis cara pengaturan pelaksanaan Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level 1 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025. Peneliti mewawancarai narasumber terkait distribusi tugas, kolaborasi di antara para pelaksana, serta langkah-langkah yang diterapkan dalam pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi.

A. SOP dan Mekanisme Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level 1

Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mekanisme merupakan elemen penting dalam organisasi birokrasi karena berfungsi sebagai panduan bagi pelaksana untuk menjalankan sebuah program. SOP mencakup langkah-langkah, ketentuan, dan prosedur yang harus diikuti agar kegiatan dapat berlangsung dengan terarah, teratur, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Keberadaan SOP yang jelas juga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan serta menciptakan konsistensi dalam pelaksanaan tugas oleh semua pihak yang terlibat.

Dalam penyelenggaraan Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level 1 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025, SOP dan cara pelaksanaan berfungsi sebagai acuan bagi panitia, pengajar, serta peserta untuk mengikuti semua tahapan

kegiatan. SOP yang diterapkan mengacu pada norma dan pedoman pelaksanaan pelatihan serta uji kompetensi pengadaan barang dan jasa yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner, pelaksanaan Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat 1 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 berjalan sesuai dengan prosedur operasional standar (SOP) dan mekanisme yang ditetapkan oleh LKPP. Prosedur ini diterapkan dengan konsisten di setiap tahap kegiatan, mulai dari pelaksanaan pelatihan hingga ujian kompetensi, mengacu pada peraturan, kurikulum, dan instruksi kerja yang telah ditetapkan. Semua pihak yang terlibat, termasuk panitia, fasilitator, pengawas, dan peserta, mengikuti prosedur yang ada sehingga kegiatan berlangsung dengan tertib dan terarah. Selain itu, peserta mendapatkan penjelasan dan arahan yang jelas tentang cara pelaksanaan kegiatan, agar proses pelatihan dan ujian berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, konsistensi dalam penerapan SOP sangat penting untuk mendukung efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan pelatihan serta uji kompetensi ini.

B. Koordinasi Pelaksanaan Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level 1

Koordinasi dalam pelaksanaan merupakan elemen penting dalam sistem birokrasi yang berfungsi untuk mengatur tugas, tanggung jawab, dan aktivitas di antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah program. Koordinasi yang efektif dapat menumbuhkan kolaborasi yang baik sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung sesuai dengan sasaran yang sudah ditentukan. Dalam pelaksanaan suatu program, koordinasi sangat penting untuk mencegah terjadinya kebingungan dalam komunikasi, pengulangan tugas, ataupun kendala yang bisa mengganggu proses kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi yang dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya interaksi dan kolaborasi yang terjalin antara pihak-pihak yang terlibat dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan. Setiap pihak telah mengerti peran dan tanggung jawab mereka masing-masing, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung dengan baik.

C. Mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level 1

Mekanisme pengawasan dan penilaian merupakan elemen krusial dalam sistem birokrasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu program sesuai dengan sasaran, prosedur, dan ketentuan yang telah ditentukan. Pengawasan dilakukan untuk mengontrol pelaksanaan aktivitas agar tetap di jalur yang telah direncanakan, sementara penilaian dilakukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan program serta mengidentifikasi

berbagai masalah yang muncul selama kegiatan berlangsung. Dengan adanya pengawasan dan penilaian, penyelenggara dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan program di periode selanjutnya.

Dalam pelaksanaan Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level 1 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, pengawasan dilakukan dari awal persiapan hingga akhir pelatihan dan tahap uji kompetensi. Pengawasan ini dilaksanakan oleh pihak penyelenggara dan panitia pelaksana untuk memastikan bahwa semua kegiatan berlangsung sesuai dengan rencana, prosedur, dan norma yang telah ditentukan.

Berdasarkan wawancara dan kuesioner yang dilakukan, proses pengawasan dan penilaian dalam Pelatihan dan Ujian Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Level 1 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025 telah dilaksanakan mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan ujian untuk memastikan bahwa semua kegiatan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Meskipun ada beberapa masalah terkait birokrasi dan administrasi, seperti keterbatasan dana, isu akses akun, dan kelengkapan dokumen peserta, evaluasi tetap dilakukan melalui *try out*, laporan pelaksanaan ujian, serta umpan balik dari peserta. Hasil dari evaluasi ini kemudian digunakan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan, agar pelatihan di masa depan dapat lebih efektif, praktis, adaptif, dan fokus pada peningkatan kemampuan peserta.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Level 1 di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan LKPP. Pelaksanaan program didukung oleh komunikasi yang efektif, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang mencakup SOP, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi. Program ini juga berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan ASN dalam bidang PBJ. Namun, masih terdapat kendala berupa perbedaan tingkat pemahaman dan kesiapan peserta dalam menghadapi uji kompetensi serta beberapa permasalahan administratif. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pembelajaran, pendampingan, dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk mendukung terciptanya ASN yang kompeten, profesional, dan berintegritas dalam pelaksanaan PBJ.

Saran

Perbaikan pelaksanaan program perlu dilakukan melalui peningkatan kegiatan try out atau latihan sebelum uji kompetensi, penguatan koordinasi antara BPSDMD, LKPP, dan instansi pengirim peserta, serta peningkatan dukungan instansi terhadap peserta selama proses pelatihan dan sertifikasi. Selain itu, BPSDMD perlu memperkuat monitoring dan evaluasi pasca-pelatihan untuk mengetahui penerapan kompetensi peserta dalam pelaksanaan PBJ di tempat kerja. Dengan demikian, hasil pelatihan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah.

DAFTAR REFERENSI

- Antara News. (2025). *Bpsdm sumbar gelar pelatihan pengadaan barang dan jasa*. Antara News.
- BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. (2025). *Laporan kegiatan pelatihan dan uji kompetensi PBJ Level 1*. BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Dharmayanti, I. D., & Rakhmasari, A. A. (2024). Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang Jasa sebagai Penentu Daya Saing Produk Indonesia. *Jurnal Pengadaan Indonesia*, 3(2), 57–68. <https://doi.org/10.59034/jpi.v3i2.51>
- Edwards, G. C. III. (1980). *Implementing public policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- LKPP. (2022). *Modul pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang/jasa Level 1*.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2021). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nainggolan, B. R., Tiurma, T., & Sipahutar, U. (2022). Pelatihan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Government Goods and Services Procurement Training Based on Presidential Regulation Number 12 of 2021. *Maret*, 4(1), 293–301.
- Patria, N. (2021). Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & ...)*, 5(1), 253–273.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018*.
- Rivai, V. (2011). *Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan: Dari teori ke praktik*. RajaGrafindo Persada.
- Satrio, S. A. S., & Lestari, Y. (2024). Evaluasi Pendidikan Dan Pelatihan (DIKLAT) Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi Administrasi Negara...*, 2, 19-27. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/innovant/article/view/29780>
- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at work: Models for superior performance*. John Wiley & Sons.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sumingkara, A. (2023). Penerapan metode observasi dalam penelitian pengadaan barang/jasa. *Jurnal Administrasi Negara*, 7(1).
- Sujatmoko, D. W. R. (2024). Evaluasi rendahnya tingkat kelulusan pelatihan pengadaan barang/jasa menggunakan model blended learning di BPSDM Provinsi Jawa Barat. *Media Bina Ilmiah*, 18(11).
- Zulianto, A. (2023). Dokumentasi dalam penelitian kualitatif pada administrasi publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2).